

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
Pengantar Redaksi.....	iii-iv
Abstrak.....	v-xii
Kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Sumatera Selatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Restorasi Gambut oleh: Sri Nurhayati Qodriyatun.....	113-132
Strategi Nafkah Keluarga Nelayan Miskin Perkotaan: Studi di Cilacap Jawa Tengah dan Badung Bali oleh: Rohani Budi Prihatin.....	133-144
Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Jakarta Utara oleh: Mohammad Mulyadi.....	145-159
Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan (Studi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan) oleh: Hartini Retnaningsih .....	161-177
Perumahan Keluarga Muda Perkotaan: Kajian dan Perumusan Model Arsitektur oleh: Mohammad Jehansyah Siregar .....	179-194
Strategi Dosen dalam Pengondisian Perilaku Membaca Mahasiswa di Era Digital: Studi Kasus di Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan oleh: Elga Andina.....	195-206
Pelindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme oleh: Sali Susiana.....	207-222
Revolusi Mental dalam Perspektif Budaya Jawa: Analisis Melalui Pemikiran Pierre Bourdieu oleh: Ujianto Singgih Prayitno.....	223-234
Tentang Penulis	
Indeks Penulis	
Pedoman Penulisan	



## PENGANTAR REDAKSI

Ada beragam topik yang menjadi perhatian para penulis dalam terbitan jurnal *Aspirasi* Vol. 8 No. 2 Desember 2017, tetapi tetap dalam lingkup perhatian jurnal *Aspirasi*, yakni masalah-masalah sosial yang menjadi perhatian masyarakat. Sri Nurhayati Qodriyatun menulis artikel tentang lingkungan. Fokus utama perhatiannya pada kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan restorasi Gambut. Kebijakan restorasi Gambut yang dilaksanakan oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengurangi dampak kebakaran hutan dan lahan gambut. Persoalannya apakah pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia sudah siap melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut. Penulis artikel ini memilih dua pemerintah daerah sebagai lokus penelitian untuk mengetahui kesiapan pemda untuk melaksanakan kebijakan restorasi gambut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan lebih siap melaksanakan kebijakan restorasi gambut, terlihat dari program yang dilaksanakan, sumber daya yang disiapkan, dan komitmen kepala daerah dalam pelaksanaan kebijakan. Namun pelaksanaan kebijakan terkendala oleh tidak adanya regulasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan di daerah. Untuk itu, ke depan perlu ada: (1) koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam setiap rencana kegiatan; (2) regulasi yang mendukung pemanfaatan dana donor untuk pelaksanaan restorasi gambut di daerah; (3) pemetaan sosial dan pemetaan ekonomi dalam pemetaan KHG; (4) mengevaluasi moratorium izin di lahan gambut; dan (5) peningkatan penegakan hukum.

Rohani Budi Prihatin mengkaji tentang kemiskinan perkotaan, terutama yang mendera nelayan perkotaan di Cilacap dan Badung. Menurutnya masyarakat nelayan Teluk Penyus Cilacap dan Pantai Kedonganan Bali merupakan kelompok nelayan yang sedang mengalami perubahan cepat dari sisi pesatnya laju perkotaan, yang pada akhirnya mengakibatkan perubahan strategi nafkahnya. Dalam studi ini penulisnya menyimpulkan bahwa masyarakat di dua wilayah tersebut mempunyai strategi adaptasi dalam mencari nafkah antara lain menjalin hubungan baik dengan pihak yang menguasai sumber ekonomi (pemilik perahu motor atau pemberi modal awal sebelum melaut), melibatkan keluarga dalam mencari nafkah, serta menghemat pengeluaran terutama ketika datangnya masa paceklik. Selain itu, kemiskinan yang dirasakan oleh nelayan perkotaan bersifat multidimensi sehingga penanganannya harus komprehensif dan tidak tambal sulam.

Muhamad Mulyadi menelaah tentang implementasi kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Jakarta Utara. Studi ini menyimpulkan, bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah. Panitia pengadaan tanah ini bertugas untuk mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya serta melakukan inventarisasi atas tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut.

Hartini Retnaningsih secara khusus menelaah tentang Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan. Studi dilakukan di dua Kota, yakni Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang belum optimal, hal itu diakibatkan adanya intervensi dari elit politik lokal. Rekomendasi yang dikemukakan adalah 1) Perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif terhadap PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang; 2) Perlu regulasi yang jelas, agar tidak ada lagi intervensi politik praktis dalam PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang; 3) Perlu dilakukan perbaikan mekanisme dalam pengusulan calon penerima bantuan PIP; 4) Perlu dilakukan perbaikan mekanisme, agar bisa dilakukan kontrol terhadap pemanfaatan bantuan PIP.

Mohammad Jehansyah Siregar menulis tentang model perumahan keluarga muda perkotaan menelaah faktor psikologi dalam penyediaan perumahan yang didasarkan pada hubungan erat yang bersifat alami antara manusia dan huniannya masih belum cukup diperhatikan. Penelitian ini berusaha untuk melihat permasalahan perumahan dari sudut pandang psikologi perkembangan, yaitu bagaimana kebutuhan-kebutuhan perumahan sebagai suatu lingkungan fisik didasarkan pada karakter penghuninya yang bersifat khas. Keluarga Muda adalah kelompok khusus yang termasuk dalam salah satu tahap perkembangan keluarga dalam siklus kehidupan manusia. Arti penting keluarga dalam kehidupan masyarakat juga menjadi latar belakang. Penelitian ini disusun berdasarkan tujuan untuk mengkaji kebutuhan-kebutuhan perumahan (*housing needs*) untuk keluarga muda berdasarkan ciri-ciri kehidupannya dalam tahap-tahap siklus perkembangan keluarga. Dengan ciri-ciri kehidupan tersebut sebagai sumber inspirasi, penelitian

ini menghasilkan keluaran berupa prinsip-prinsip atau kriteria-kriteria perencanaan dan perancangan perumahan (model perumahan) untuk keluarga muda. Hasil penelitian ini dapat dilanjutkan untuk membuat beberapa alternatif prototipe dasar perumahan keluarga muda di Indonesia.

Elga Andina menulis tantangan dosen dalam memotivasi perilaku membaca mahasiswa di era digital. Studi tersebut dilakukan di Kalimantan Barat Dan Sulawesi Selatan. Studi ini menyimpulkan bahwa perilaku membaca mahasiswa tidak tumbuh karena kurangnya pembinaan di jenjang pendidikan sebelumnya. Interaksi dengan teknologi informasi dan telekomunikasi di era digital semakin menjauhkan mahasiswa dari perilaku membaca yang diharapkan.

Sali Susiana menulis tentang perlindungan hak pekerja perempuan. Ia menjelaskan hak pekerja perempuan telah dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan beberapa peraturan pelaksanaannya. Jaminan hak tersebut juga sejalan dengan berbagai konvensi internasional yang mengatur tentang hak pekerja perempuan.

Artikel terakhir ditulis Ujinato Singgih, ia secara khusus menelaah revolusi mental dalam perspektif budaya Jawa melalui pemikiran Pierre Bourdieu, menurutnya kondisi sosial budaya masyarakat dewasa ini makin mengkhawatirkan, baik dilihat dari relasi antarindividu ataupun kelompok yang tidak harmonis, juga kecenderungan masyarakat yang menggunakan kekerasan sebagai mekanisme penyelesaian masalah yang dihadapinya. Kekhawatiran tersebut perlu segera diselesaikan, dan revolusi mental sebagai sebuah gagasan mendapatkan momentumnya. Studi ini menyimpulkan, dalam perspektif sosiologi, revolusi mental hanya mungkin dilakukan dalam proses pembebasan sebagai sebuah sistem disposisi-disposisi, skema-skema persepsi, pikiran, dan tindakan yang diperoleh dan bertahan lama. Budaya Jawa yang ditonjolkan adalah yang merepresentasikan semangat yang menggugah dan membangkitkan kegigihan dan kerja keras yang dinamis (*greget*), percaya diri dalam bertindak (*sungguh*), tidak akan mundur setapak pun dan siap menanggung segala risiko apa pun yang harus dihadapi (*ora mingkuh*) dengan penuh rasa tanggung jawab demi terwujudnya cita-cita yang diidam-idamkannya.

Demikian gambaran umum berbagai artikel yang tersaji dalam Jurnal Aspirasi Volume 8 Nomor 2 Desember 2017. Semoga berbagai artikel tersebut dapat menambah dan memperluas wawasan pembaca.

Jakarta, 30 Desember 2017  
Redaksi

**ASPIRASI**  
**Jurnal Masalah-Masalah Sosial**

**Vol. 8 No. 2 Desember 2017**

**ISSN: 2086-6305**

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

**Sri Nurhayati Qodriyatun**

*Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*

**Kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Sumatera Selatan  
dalam Pelaksanaan Kebijakan Restorasi Gambut**

**Jurnal ASPIRASI Vol. 8 No. 2 Desember 2017  
halaman 113-132**

**ABSTRACT**

*Peatland restoration policy was launched by the government to reduce negative impacts of forest and land fires on peatlands. Riau Province and South Sumatera Province are two provinces in the list of priority locations of the implementation of peatland restoration policy in 2016. What raise as a problem is the nature of preparedness of the two provinces in implementing the policy. Through qualitative research conducted in 2016, the research showed that South Sumatera Province is better prepared in implementing policy, as seen from the implemented program, prepared resources, and commitment of regional head in the implementation of the policy. However, policy implementation is constrained by the absence of regulations to support policy implementation in the province. In the future, there are some needs for: (1) coordination between central and regional governments in each activity plan; (2) regulation to support the use of donor funds for implementation of the policy at regional levels; (3) social mapping and economic mapping of KHG mapping; (4) evaluation on moratorium on permits and licenses for peatlands; and (5) improvement on law enforcement.*

**Keyword:** *forest and land fires, peatland restoration policy, Riau, South Sumatera.*

**ABSTRAK**

Kebijakan restorasi gambut diluncurkan pemerintah untuk mengurangi dampak negatif kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut. Provinsi Riau dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang menjadi prioritas lokasi pelaksanaan kebijakan restorasi gambut di tahun 2016. Permasalahannya adalah bagaimana kesiapan kedua provinsi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan tersebut? Melalui penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahun 2016, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan lebih siap melaksanakan kebijakan restorasi gambut, terlihat dari program yang dilaksanakan, sumber daya yang disiapkan, dan komitmen kepala daerah dalam pelaksanaan kebijakan. Namun pelaksanaan kebijakan terkendala oleh tidak adanya regulasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan di daerah. Untuk itu, ke depan perlu ada: (1) koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam setiap rencana kegiatan; (2) regulasi yang mendukung pemanfaatan dana donor untuk pelaksanaan restorasi gambut di daerah; (3) pemetaan sosial dan pemetaan ekonomi dalam pemetaan KHG; (4) evaluasi moratorium izin di lahan gambut; dan (5) peningkatan penegakan hukum.

**Kata kunci:** kebakaran hutan dan lahan, kebijakan restorasi gambut, Riau, Sumatera Selatan.

**ASPIRASI**  
**Jurnal Masalah-Masalah Sosial**

**Vol. 8 No. 2 Desember 2017**

**ISSN: 2086-6305**

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

**Rohani Budi Prihatin**

*Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*

**Strategi Nafkah Keluarga Nelayan Miskin Perkotaan:  
Studi di Cilacap Jawa Tengah dan Badung Bali**

**Jurnal ASPIRASI Vol. 8 No. 2 Desember 2017  
halaman 133-144**

**ABSTRACT**

*This study analyzes urban poor fishing families' livelihoods in Teluk Penyu Cilacap and Kedonganan Bali as a group of fishing families underwent rapid changes of urban growth, which ultimately succeeded in changing their livelihoods strategy. By conducting in-depth interviews and field observations, this research seeks to capture their livelihoods strategies in the face of natural and structural limitations of the fishing families' world. The result indicates that people in both areas have adaptation strategies for their livelihoods, such as establishing good relationships with those who control the resources i.e. owners of motorboats or early stage capital providers, involving family members in their livelihoods, and saving expenses especially during the period of famine. In addition, as the poverty of fishing families is multidimensional in nature, the key is not to have a makeshift way but to bring a holistic and comprehensive approach to the problems.*

**Keywords:** *livelihood, urban poor fishing family, adaptation strategy.*

**ABSTRAK**

Tulisan ini membahas mengenai strategi nafkah keluarga nelayan miskin perkotaan di Teluk Penyu Cilacap dan Pantai Kedonganan Bali yang merupakan kelompok nelayan yang sedang mengalami perubahan cepat dari sisi pesatnya laju perkotaan, yang pada akhirnya mengakibatkan perubahan strategi nafkahnya. Dengan melakukan wawancara mendalam serta pengamatan di lapangan, penelitian ini berusaha memotret keluarga nelayan miskin dalam melakukan strategi nafkah di tengah mereka menghadapi kendala alam dan kendala struktural dunia nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di dua wilayah tersebut mempunyai strategi adaptasi dalam mencari nafkah antara lain menjalin hubungan baik dengan pihak yang menguasai sumber ekonomi (pemilik perahu motor atau pemberi modal awal sebelum melaut), melibatkan keluarga dalam mencari nafkah, serta menghemat pengeluaran terutama ketika datangnya masa paceklik. Selain itu, kemiskinan yang dirasakan oleh nelayan perkotaan bersifat multidimensi sehingga penanganannya harus komprehensif dan tidak tambal sulam.

**Kata kunci:** nafkah, keluarga nelayan miskin perkotaan, strategi adaptasi.

**ASPIRASI**  
**Jurnal Masalah-Masalah Sosial**

**Vol. 8 No. 2 Desember 2017**

**ISSN: 2086-6305**

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

**Mohammad Mulyadi**

*Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*

**Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Jakarta Utara**

**Jurnal ASPIRASI Vol. 8 No. 2 Desember 2017**

**halaman 145-159**

**ABSTRACT**

*The research based on the assumptions on the phenomena used as the study object is intended to examine and to analyze the nature of land policy in North Jakarta Municipal Administration is designated for public interest. Referring to the purpose of the research achieved, this study aims at: 1) Identifying and describing the form of interpretation of land acquisition for public interest; 2) Identifying and explaining the form of land procurement organization for public interest; 3). Identifying and explaining the form of land acquisition for public purposes. This study used qualitative approach, with data collection conducted prioritizing the views of informants. The results of land acquisition research for public interest were conducted with the help of land procurement committee. One duty of the committee is to conduct research on the legal status of the right to the land that will be waived or claimed and supporting documents as well as to undertake inventory over land including buildings or standing structures built upon it.*

**Keywords:** *policy, land procurement, public interest.*

**ABSTRAK**

Penelitian yang disusun berdasarkan asumsi terhadap fenomena yang dijadikan obyek kajian dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana kebijakan pertanahan di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Merujuk pada maksud penelitian yang dicapai, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk interpretasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum; 2) Mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk pengorganisasian pengadaan tanah untuk kepentingan umum; 3). Mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan mengutamakan pandangan informan. Hasil penelitian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah. Panitia pengadaan tanah ini bertugas untuk mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya serta melakukan inventarisasi atas tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut.

**Kata kunci:** kebijakan, pengadaan tanah, kepentingan umum.

**ASPIRASI**  
**Jurnal Masalah-Masalah Sosial**

**Vol. 8 No. 2 Desember 2017**

**ISSN: 2086-6305**

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

**Hartini Retnaningsih**

*Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*

**Program Indonesia Pintar:**

**Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan**

**(Studi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan)**

**Jurnal ASPIRASI Vol. 8 No. 2 Desember 2017**

**halaman 161-177**

**ABSTRACT**

*Smart Indonesia Program (PIP) is one of social security policies in education with a purpose to provide assistance for students from underprivileged families. What raise as a problem is the implementation of that policy. This research wants to analyze that problem. This research used qualitative method, with unit of analysis on PIP implementation in Kupang City and Palembang City. Both cities were chosen as analytical units because they were major beneficiaries of the PIP. The result of the research shows that the implementation of the PIP in Kupang City and Palembang City has not been optimal, due to the intervention of the local political elites forcing certain students' names that should receive assistance. Recommendations proposed are: 1) A comprehensive evaluation of the PIP in Kupang City and Palembang City; 2) A strict regulation that there will not be any politic intervention practices to PIP in Kupang City and Palembang City; 3) Improvement of mechanism on proposing prospective beneficiaries of the PIP; 4) Improvement of mechanism on controlling the utilization of the PIP assistance.*

**Keywords:** *Smart Indonesia Program (PIP), implementation of social security policy, education, Kupang City, Palembang City.*

**ABSTRAK**

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu kebijakan jaminan sosial di bidang pendidikan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada siswa-siswa dari kalangan miskin. Yang menjadi permasalahan, bagaimana implementasi kebijakan PIP di lapangan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan unit analisis implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang. Kedua kota dipilih sebagai unit analisis karena termasuk wilayah yang menerima bantuan PIP terbanyak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan, implementasi PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang belum optimal, akibat adanya intervensi dari elit politik lokal berupa pemaksaan nama-nama siswa yang harus diberi bantuan. Rekomendasi yang dikemukakan adalah 1) Evaluasi yang komprehensif terhadap PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang; 2) Regulasi yang jelas, agar tidak ada lagi intervensi politik praktis dalam PIP di Kota Kupang dan Kota Palembang; 3) Perbaikan mekanisme dalam pengusulan calon penerima bantuan PIP; 4) Perbaikan mekanisme dalam rangka kontrol pemanfaatan bantuan PIP.

**Kata kunci:** Program Indonesia Pintar (PIP), implementasi kebijakan jaminan sosial, pendidikan, Kota Kupang, Kota Palembang.



**ASPIRASI**  
**Jurnal Masalah-Masalah Sosial**

**Vol. 8 No. 2 Desember 2017**

**ISSN: 2086-6305**

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

**Mohammad Jehansyah Siregar**  
*Institut Teknologi Bandung*

**Perumahan Keluarga Muda Perkotaan:  
Kajian dan Perumusan Model Arsitektur**

**Jurnal ASPIRASI Vol. 8 No. 2 Desember 2017**  
**halaman 179-194**

**ABSTRACT**

*Attention on psychology of family development factor is not much considered yet in the provision of urban housing with regard to its natural relation between human and their housing. This paper describes a housing need assessment that is essential for the life of urban young family. This analysis creates a housing architectural model based on architectural design methodology, where characteristics in stages of family development cycle become the source of inspiration in the formulation of design principles of urban young family housing model. As the result of this analysis, housing model for urban young family describes houses that provide separated units in form of urban rental housing. The houses are small, compact and flexible units within a safe neighborhood and equipped with facilities that have attention on housing need of young families and become the place for interaction between mothers and children. As a model for urban housing design, output of this architectural research is potential for further exploration to develop a basic housing design prototype for young family in urban Indonesia.*

**Keywords:** *young family, urban, housing model.*

**ABSTRAK**

Faktor psikologi perkembangan keluarga dalam penyediaan perumahan di perkotaan yang didasarkan pada hubungan alami antara manusia dan huniannya masih belum cukup diperhatikan. Makalah ini memaparkan sebuah hasil kajian kebutuhan perumahan (housing need) yang sangat penting untuk kehidupan keluarga muda di perkotaan. Kajian ini menghasilkan model arsitektur perumahan berdasarkan metodologi perancangan arsitektur. Ciri-ciri kehidupan dalam tahap-tahap siklus perkembangan keluarga menjadi sumber inspirasi untuk merumuskan prinsip-prinsip perancangan perumahan untuk keluarga muda perkotaan. Model perumahan untuk keluarga muda perkotaan yang dihasilkan dari kajian ini memberikan gambaran perumahan sebagai tempat tinggal yang terpisah, dalam bentuk rumah sewa perkotaan. Model perumahan ini berbentuk unit-unit hunian yang kecil, kompak dan fleksibel, di lingkungan yang aman dari bahaya dan dilengkapi dengan fasilitas yang memperhatikan kebutuhan hunian pasangan muda, serta menjadi wadah yang optimal untuk interaksi ibu dan anak. Sebagai sebuah model umum untuk perancangan perumahan perkotaan, hasil penelitian arsitektur ini dapat dilanjutkan untuk membuat prototipe dasar perancangan perumahan keluarga muda di kawasan perkotaan di Indonesia.

**Kata kunci:** keluarga muda, perkotaan, model perumahan.

**ASPIRASI**  
**Jurnal Masalah-Masalah Sosial**

**Vol. 8 No. 2 Desember 2017**

**ISSN: 2086-6305**

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

**Elga Andina**

*Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*

**Strategi Dosen dalam Pengondisian Perilaku Membaca Mahasiswa di Era Digital:  
Studi Kasus di Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan**

**Jurnal ASPIRASI Vol. 8 No. 2 Desember 2017**  
**halaman 195-206**

**ABSTRACT**

*Reading is an activity that helps develop college student's thinking ability, as well as support academic performance and achievement. This study wanted to know how the role of lecturers in shaping student's reading behavior in the digital era. By interviewing 26 lecturers, 38 students, 2 university library heads and an officer of provincial education authorities, this study found that students' reading behavior did not grow due to lack of guidance in the previous education level. Interaction with information technology and telecommunications in the digital era increasingly keeps students away from the expected reading behavior. Intervention of the lecturer becomes important in conditioning the reading behavior, that is with the assignment of notes and the assignment of reading. In addition, universities need to prepare facilities and infrastructures that support the growth of student's reading behavior.*

**Keywords:** *reading behavior, college students, lecturer, conditioning.*

**ABSTRAK**

Membaca adalah kegiatan yang membantu mengembangkan pemikiran mahasiswa sehingga mendukung performa dan pencapaian akademik. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana peran dosen dalam membentuk perilaku membaca mahasiswa di era digital. Dengan mewawancarai 26 dosen, 38 mahasiswa, 2 pimpinan perpustakaan kampus, dan 1 pejabat dinas pendidikan provinsi, peneliti menemukan bahwa perilaku membaca mahasiswa tidak tumbuh karena kurangnya pembinaan di jenjang pendidikan sebelumnya. Interaksi dengan teknologi informasi dan telekomunikasi di era digital semakin menjauhkan mahasiswa dari perilaku membaca yang diharapkan. Intervensi dari dosen menjadi penting dalam mengondisikan perilaku membaca, yaitu dengan penugasan mencatat dan penugasan membaca. Selain itu, perguruan tinggi perlu mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung tumbuhnya perilaku membaca mahasiswa.

**Kata kunci:** perilaku membaca, mahasiswa, dosen, pengondisian.

**ASPIRASI**  
**Jurnal Masalah-Masalah Sosial**

**Vol. 8 No. 2 Desember 2017**

**ISSN: 2086-6305**

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

**Sali Susiana**

*Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*

**Pelindungan Hak Pekerja Perempuan dalam Perspektif Feminisme**

**Jurnal ASPIRASI Vol. 8 No. 2 Desember 2017**  
**halaman 207-222**

**ABSTRACT**

*The rights of women workers have been guaranteed in the constitution, several laws, and some of its implementing regulations. In the constitution, the equal rights of women to work and receive appropriate treatment are provided in Article 27 and Article 33. Some of the laws and regulations governing the rights of women workers, among others, are Law Number 13 of 2003 on Manpower, Law Number 8 of 1981 on Wage Protection, Regulation of the Minister of Manpower No. 8 Per-04 / Men / 1989 on the Terms of Night Work and Procedures of Hiring Women Workers at Night, and Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No. Kep. 224 / Men / 2003 on Obligations of Employers Employing Female Workers between 23:00 to 07.00. The rights of female workers to include: protection of working hours, protection during menstruation, protection during pregnancy and childbirth, including when female workers experience miscarriage (maternity leave and delivery), provision of breastfeeding sites (breastfeeding rights and / or milking), work competence rights, as well as medical rights during pregnancy and post-natal period. The rights guaranteed are in line with the international conventions regulating the rights of women workers required by the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) which has been ratified by Law Number 7 of 1984 and several other relevant conventions. Exercising feminism perspective, this study concludes that not all women workers' rights can be met, whether caused by internal factors or external factors. Internal factors contributed within the women workers themselves. Their lack of knowledge and understanding about their own rights. Whereas, influencing external factors are the existence of patriarchal culture, the marginalization in work, the stereotype of women, and lack of socialization.*

**Keywords:** *employment, protection, women workers, women workers rights.*

**ABSTRAK**

Hak pekerja perempuan telah dijamin dalam konstitusi, undang-undang, dan beberapa peraturan pelaksanaannya. Dalam konstitusi, persamaan hak perempuan untuk bekerja dan mendapat perlakuan yang layak terdapat dalam Pasal 27 dan Pasal 33. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pekerja perempuan antara lain, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pelindungan Upah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Per-04/Men/1989 tentang Syarat-syarat Kerja Malam dan Tata Cara Mempekerjakan Pekerja Perempuan pada Malam Hari, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Hak pekerja perempuan tersebut antara lain: pelindungan jam kerja, pelindungan dalam masa haid (cuti haid), pelindungan selama hamil dan melahirkan, termasuk ketika pekerja perempuan mengalami keguguran (cuti hamil dan melahirkan), pemberian lokasi menyusui (hak menyusui dan/atau merah ASI), hak kompetensi kerja, hak pemeriksaan selama masa kehamilan dan pasca-melahirkan. Jaminan hak tersebut sejalan dengan konvensi internasional yang mengatur tentang hak pekerja perempuan yang terdapat dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan beberapa konvensi terkait lainnya. Dengan perspektif feminisme, studi ini menyimpulkan bahwa sampai saat ini belum semua hak pekerja perempuan tersebut dapat dipenuhi, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal tampak pada masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman pekerja perempuan mengenai hak yang dimilikinya. Sementara faktor eksternal tampak pada: adanya budaya patriarki, marginalisasi dalam pekerjaan, adanya stereotype kepada perempuan, dan kurangnya sosialisasi.

**Kata kunci:** *ketenagakerjaan, pelindungan, pekerja perempuan, hak pekerja perempuan.*

**ASPIRASI**  
**Jurnal Masalah-Masalah Sosial**

**Vol. 8 No. 2 Desember 2017**

**ISSN: 2086-6305**

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

**Ujianto Singgih Prayitno**

*Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*

**Revolusi Mental dalam Perspektif Budaya Jawa:  
Analisis Melalui Pemikiran Pierre Bourdieu**

**Jurnal ASPIRASI Vol. 8 No. 2 Desember 2017  
halaman 223-234**

**ABSTRACT**

*The socio-cultural conditions of today's society are increasingly worrisome, whether viewed from the relationships between individuals or groups that are not harmonious, also the tendency of people who use violence as a mechanism to solve the problems they faced. Such concerns need to be resolved immediately, and the Mental Revolution as an idea gains its momentum. The approach developed in this analysis is the concepts of practice and action implementation, by examining the role of Javanese culture. The selection of Javanese Culture as the basis for the development of Mental Revolution value is inseparable from the culture or ethnic Javanese as the largest ethnic group in Indonesia which reaches 40 percent of the population. Dominant culture is a substantive model that reflects the fact that there is a rule of action in social life that is mutually agreed upon in emerging social interactions. Most Javanese everywhere, tend to maintain their Javanese ethnicity in their daily lives.*

**Keywords:** *structural, habitus, Javanese culture, Mental Revolution.*

**ABSTRAK**

Kondisi sosial budaya masyarakat dewasa ini makin mengkhawatirkan, baik dilihat dari relasi antar individu ataupun kelompok yang tidak harmonis, juga kecenderungan masyarakat yang menggunakan kekerasan sebagai mekanisme penyelesaian masalah yang dihadapinya. Kekhawatiran tersebut perlu segera diselesaikan, dan revolusi mental sebagai sebuah gagasan mendapatkan momentumnya. Pendekatan yang dibangun dalam analisis ini adalah konsep-konsep praktik dan pelaksanaan tindakan, dengan mengkaji peran kebudayaan Jawa. Pemilihan Budaya Jawa sebagai dasar bagi pengembangan nilai Revolusi Mental, tidak terlepas dari budaya atau etnik Jawa merupakan etnik terbesar di Indonesia yang mencapai 40 persen dari populasi. Kebudayaan dominan adalah sebuah model substantif yang merefleksikan kenyataan yang memperlihatkan adanya aturan main dalam kehidupan sosial yang disetujui bersama dalam interaksi sosial yang muncul. Kebanyakan orang Jawa dimanapun berada, cenderung untuk mempertahankan kesukubangsaan mereka yang Jawa dalam kehidupan sehari-hari mereka.

**Kata kunci:** struktural, habitus, budaya Jawa, Revolusi Mental.